

**PLURALISME PADA MASA BALI KUNO ABAD IX-XIV BERDASARKAN
REKAMAN ARKEOLOGI**

Pluralism in Ancient Bali IX-XIV Century Based on Archaeological Record

I Wayan Srijaya dan Kadek Dedy Prawirajaya R

Universitas Udayana

Jalan Pulau Nias No. 13, Denpasar, Bali 80113

Email: srijaya59@yahoo.com dan dedyprawirajaya@unud.ac.id

Naskah masuk: 02-12-2020; direvisi: 24-07-2021; disetujui: 03-10-2021

Abstract

Pluralism is a diction that is used to express diversity, a reality that exists in this archipelago. It is an idea or view of life that recognizes and accepts the existence of pluralism or diversity in a community group. This plurality is represented by differences in terms of religions/beliefs, ethnicities, races, customs, languages, and cultures. Archaeological remains dating from the Hindu Buddhist era in Bali provide information on this diversity. Therefore, the aim of this study is to explain the diversity that is reflected in the archaeological records. The method used is observation, literature study, and qualitative analysis. Archaeological records dating from the IX to XIV century AD in Bali, both in the artifactual and textual indicate that Balinese people can live in harmony amidst differences. Different beliefs do not cause social tensions in society. Based on the existing archaeological records, Balinese people have shown diversity since the IX century AD. This diversity was maintained and nurtured by the rulers at that time so that tolerance was built between people of different religions/beliefs.

Keywords: pluralism, ancient Bali, religion, archaeological remains.

Abstrak

Pluralisme merupakan diksi yang digunakan untuk menyatakan keberagaman, sebuah realita yang ada di bumi Nusantara ini. Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan tersebut direpresentasikan oleh adanya perbedaan dari sisi agama/kepercayaan, suku, ras, adat istiadat, bahasa, dan budaya. Tinggalan arkeologi yang berasal dari masa Hindu Buddha di Bali memberikan informasi keberagaman tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemajemukan yang tercermin pada rekaman tinggalan arkeologi tersebut. Metode yang digunakan adalah observasi, studi pustaka, serta analisis kualitatif. Rekaman arkeologi yang berasal dari abad IX-XIV di Bali, baik yang berupa artefaktual dan tekstual mengindikasikan bahwa masyarakat Bali dapat hidup secara harmonis di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan keyakinan yang dianut tidak menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat. Berdasarkan rekaman arkeologi yang ada, masyarakat Bali telah menunjukkan kemajemukan sejak abad IX. Keberagaman ini terus dipelihara dan dipupuk oleh para penguasa ketika itu sehingga terbangun toleransi di antara masyarakat yang berlainan agama/kepercayaannya.

Kata kunci: pluralisme, Bali kuno, agama, tinggalan arkeologi.

PENDAHULUAN

Pluralisme dalam lingkup ilmu pengetahuan adalah sebuah paham yang bersedia menerima berbagai perbedaan yang ada antar manusia satu dengan yang lain. Dilihat dari segi susunan harfiahnya, pluralisme tersusun dari dua kata, yaitu plural yang berarti beraneka ragam dan isme yang artinya adalah paham. Di Indonesia, kesadaran akan pluralisme sangatlah penting, mengingat masyarakat sangat beragam dari berbagai aspek. Meski salah satu dampak buruk dari pluralisme adalah konflik, namun ini tidak berarti yang perlu disorot adalah sisi konfliknya, tetapi sisi keberagaman yang nyata dan harus disikapi dengan tenang dan bijaksana melalui pemahaman akan pluralisme. Pluralisme merujuk pada keadaan masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, asal, dan latar belakang budaya. Dalam hubungan ini, maka yang penting adalah adanya keragaman atau kemajemukan tanpa melihat interaksi di antara mereka (Tanudirjo 2011, 1). Pengertian di atas hanya memenuhi unsur “bhineka” saja, tidak mengandung unsur “tunggal” yang sesungguhnya menyiratkan adanya sifat hubungan anatara yang beragam itu, yaitu kesatuan. Sementara multikulturalisme lebih kepada konsep politik, khususnya politik identitas, karena itu mempunyai berbagai makna yang dapat dikaitkan dengan konteks penggunaannya (Tanudirjo 2011, 1). Oleh karena itu, multikulturalisme merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam menghadapi masyarakat yang beragam atau plural.

Menurut Ashworth seperti dikutip (Tanudirjo 2011, 2) ada lima variasi kebijakan dalam menghadapi perbedaan, yaitu (1) inti tunggal yakni masyarakat hanya mengakui adanya satu budaya yang asli di tempat itu, yang lain harus melebur dalam budaya itu, baik melalui proses asimilasi maupun integrasi; (2) inti+ yakni budaya inti yang dominan dikelilingi oleh budaya-budaya yang minoritas. Budaya minoritas biasanya menerima dominasi dan tidak menuntut disejajarkan dengan budaya

dominan karena menyadari akar sejarah, jumlah pendukung dan kekuatan politik budaya dominan; (3) wadah pelebur (*melting pot*) yakni berbagai budaya yang ada melebur menjadi satubudaya yang memiliki ciri dan nilai-nilai yang sama sekali baru, sehingga ciri-ciri budaya yang melebur sulit dikenali lagi; (4) tiang penyangga (*pillar*) yakni suatu masyarakat (negara) dibayangkan ditopang oleh sejumlah pilar budaya yang berdiri secara mandiri. Setiap pilar tidak banyak memiliki hubungan dengan pilar budaya lainnya, namun secara bersama-sama mendukung keberadaan bangunan itu. Dalam hal ini, tidak ada kelompok yang diistimewakan, semua setara; dan (5) gado-gado (*salad bowl*) pelangi mozaik yakni masyarakat mengakomodasi beragam budaya yang bercampur menciptakan kesatuan budaya tanpa kehilangan masing-masing ciri budayanya.

Rekaman arkeologi dapat menghadirkan keberagaman dimasa lampau yang sudah ada sejak ribuan tahun. Keragaman budaya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) lingkungan alam kawasan yang cukup beragam sehingga setiap komunitas akan menciptakan budaya yang berbeda dalam rangka beradaptasi pada lingkungannya; (2) lokasi kepulauan yang strategis telah menjadikan kawasan ini sebagai tempat tujuan dan migrasi, sehingga menjadi tempat persilangan beragam budaya; dan (3) dua kondisi tadi menyebabkan masyarakat yang tinggal dikawasan ini mengalami evolusi budaya pada tingkat yang berbeda-beda dan menjadi semakin beragam karena dipadu dengan hasil difusi budaya. Contoh menarik tentang hal ini adalah rumpun bahasa Austronesia. Anggota rumpun yang tersebar amat luas ini mempunyai hubungan. Bahasa-bahasa itu sesungguhnya tidak mengalami perpecahan bahasa, tetapi justru mempertahankan hubungan dialek (*dialect linkage*). Gambaran ini memperlihatkan bahwa walaupun komunitas penuturnya hidup terpisah tetapi mereka masih memelihara hubungan sehingga inovasi disuatu tempat akan

ditularkan juga ke komunitas lainnya. Dengan demikian, mereka tetap memelihara hubungan dan nilai-nilai inti budaya yang sama (Tanudirjo 2011, 7).

Ketika pengaruh kebudayaan India masuk dengan budaya Hindu dan Buddha, seperti ditunjukkan oleh prasasti di kerajaan Kutai. Prasasti-prasasti yupa yang dikeluarkan oleh Raja Mulawarman menyiratkan konsep megalitik yang berintikan penghargaan tinggi pada leluhur dan keinginan mensejahterakan masyarakat yang berkembang sejak masa prasejarah masih tetap dipertahankan, meskipun menggunakan lambang-lambang Hindu. Demikian pula tentang konsep pendirian candi tidak sama dengan di India yang diperuntukkan pada dewa-dewa, karena di Indonesia candi lebih dipakai sebagai *pendharmaan* (pemuliaan) tokoh atau pemimpin (raja) yang dianggap telah berjasa pada rakyat. Tokoh inilah yang kemudian di wujudkan sebagai dewa. Kehadiran kedua agama besar tidak serta merta menghilangkan sistem kepercayaan yang sudah diyakini oleh masyarakat nusantara. Dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian serta prinsip-prinsip kepercayaan yang sudah ada, sehingga kedua agama ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa kedua agama ini di negeri asalnya (India) tidak berjalan harmonis, bahkan sering terjadi pergolakan yang berbuntut pada peperangan.

Namun sebaliknya, kondisi berbeda justru terjadi di Asia Tenggara khususnya di Indonesia (Tanudirjo 2011, 3–4). Contoh lain yang dapat dikemukakan adalah Candi Prambanan yang bersifat Hindu dan Candi Sewu yang Budhis didirikan secara berdampingan dan bahkan saling melengkapi. Bahkan, saling mendukung antara penganut Hindu dan Buddha terabadikan pada Candi Plaosan. Sejumlah prasasti pendek yang ditemukan di kompleks candi ini menunjukkan penganut Hindu menyumbangkan candi perwara bagi percandian Buddha ini. Demikian pula disekitar Candi Borobudur yang Budhis terdapat cukup banyak candi Hindu dalam ukuran yang lebih kecil (Santiko

2013, 8). Candi Borobudur yang megah juga menunjukkan unsur-unsur pemujaan leluhur dan pendidikan yang tidak mengutamakan unsur bendawi (materialisme) sebagai wujud nilai-nilai inti budaya yang terus dipertahankan (Yusuf dalam Tanudirjo 2011, 5). Demikian pula pada masa Majapahit, tidak jauh dari pusat kerajaan hidup masyarakat yang memeluk agama Islam. Bahkan diduga sejumlah pejabat kerajaan sudah ada yang memeluk agama Islam (Santiko 2013, 6).

Harmonisasi dalam menjaga perbedaan juga ditemukan di Bali dalam rekaman arkeologi, salah satu di antaranya di Situs Pura Dangka Tembau Denpasar (Bagus dan Rema 2017, 65–76). Di pura ini terdapat banyak tinggalan arkeologi yang bercorak Hindu seperti lingga-yoni, arca Ganeśa, arca Durga Mahisasuramardhini, arca Nandi, dan artefak lainnya. Dalam kehidupan keagamaan, aliran Śiwaisme mendapat tempat yang terhormat pada masa Bali kuno sebagaimana ditunjukkan oleh banyaknya tinggalan yang bercorak Śiwaisme (Sumerata dan Basudewa 2016, 93–104) sebagaimana ditemukan di Kota Denpasar. Dominasi sekte Śiwaisme ini tidak berarti meniadakan sekte lainnya. Kenyataan ini dapat disaksikan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini yang mengenal *soroh* yang menyatukan kelompok-kelompok masyarakat dalam ikatan keluarga. Namun demikian, paham Śiwasidhanta yang sudah ada sejak zaman Bali kuno tetap merupakan kelompok dominan.

Pengaruh agama Hindu dan Buddha di Bali diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7. Bukti awal adanya pengaruh Hindu di Bali yaitu dengan ditemukannya sebuah arca Dewa Wisnu di Pura Patapan Lembean, Kintamani (Suarbhawa 2010, 10; Wira Darma 2018, 54; Srijaya dan Wiguna 2018, 25). Arca Wiṣṇu ini memperlihatkan gaya yang sama dengan arca Wiṣṇu dari daerah Cibuaya, Jawa Barat (Wirjoseparto 1966, 45). Kemudian, bukti lainnya adalah arca Siwa Mahadewa di pura Desa Alit Bedulu yang memiliki karakter lemah lembut dan sifat-sifat kedewataan

(*divine expression*), yaitu mata setengah terpejam mengarah ke ujung hidung. Kemudian berdasarkan bukti-bukti arkeologi yang berhasil ditemukan diketahui bahwa agama Buddha sudah ada sekitar abad ke-9. Hal ini ditandai dengan ditemukannya sejumlah stupika tanah liat yang di dalamnya terdapat meterai yang berisi mantra-mantra Buddha (Stutterheim 1929, 76). Selain bukti-bukti artefak yang disebutkan di atas, kehadiran kedua agama tersebut di Bali juga tersirat dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh para penguasa kerajaan Bali kuno. Dalam prasasti tersurat adanya pejabat yang mewakili kedua agama tersebut, yaitu *Dang Upadhiyaya* (pendeta Buddha) dan *Dang Achāryā* (pendeta Śīwa/Hindu) dalam struktur pemerintahan Bali kuno.

Kehadiran kedua agama pada waktu itu menunjukkan bahwa keberagaman telah mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sejajar oleh negara atau kerajaan. Oleh karena itu, para tokoh dari kedua agama ini mendapat tempat dalam struktur pemerintahan yang ada saat itu. Sebagai penganut agama yang berbeda, yang di negerinya sering terjadi ketidakharmonisan, namun di Nusantara khususnya di Bali kedua agama itu dapat hidup rukun berdampingan. Disinilah bentuk toleransi yang dibangun oleh para penguasa sehingga mendapat pengakuan dan perlindungan yang sama dari kerajaan/negara. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja bukti-bukti arkeologi yang menggambarkan pluralisme pada zaman Bali kuno.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemajemukan pada zaman Bali kuno yang terekam dalam tinggalan arkeologi. Dengan mengetahui keberagaman yang dapat dijadikan bahan *mulat sarire* ditengah isu konflik yang merebak belakangan. Itulah sebabnya, kajian yang berkaitan dengan kebhinekaan berdasarkan rekaman arkeologi dapat menjadi cermin untuk memupuk kembali nilai-nilai persatuan, kebersamaan, gotong royong, dan toleransi. Manfaat penelitian ini adalah dapat

menjadi masukan dalam upaya merekatkan kembali nilai-nilai kebersamaan yang telah di contohkan oleh para pendahulu bangsa ini.

Penelitian ini menggunakan teori pluralisme budaya Horace Kallen (1924) dalam tulisannya berjudul *Culture and Democracy in the United States* sebagaimana dikutip oleh Kawuryan Sekar Purbarini (Kawuryan 2009, 24). Ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Teori Kallen mengakui bahwa budaya yang dominan harus juga diakui masyarakat. Dalam konteks ini teori Kallen bersesuaian dengan kemajemukan yang terjadi di Indonesia umumnya dan Bali khususnya. Sebagai contoh bahwa paham *Śīwasidhānta* (Soebadio 1971, 43) merupakan aliran yang dominan dianut oleh masyarakat Bali kuno, tetapi paham Budhisme yang minoritas pun diakui sebagai agama resmi kerajaan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan masyarakat majemuk yang terekam melalui tinggalan arkeologi pada masa Bali kuno abad IX-XIV. Tinggalan arkeologi itu tersimpan diberbagai pura yang ada di Kabupaten Gianyar, Bali. Oleh masyarakat, tinggalan tersebut dipandang sebagai benda yang disakralkan (*living monument*). Selain artefak, kemajemukan juga tampak dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan raja-raja masa Bali Kuno yang sudah dilakukan alih aksara dan alih bahasa. Untuk mengetahui itu semua maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap situs yang diduga memiliki karakter artefak Hindu-Buddha, sedang studi pustaka ditujukan untuk mendapatkan data tambahan yang berkaitan dengan pluralisme. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian berdasarkan

mutu atau nilai dari benda tersebut secara deskriptif dan bersifat non-numerik. Moleong menawarkan konsep kualitatif sebagai proses memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diubah ke dalam bentuk teks berupa deskripsi. Hal itulah esensi dari analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme Berdasarkan Rekaman Arkeologi

Pulau Bali kaya dengan tinggalan arkeologi, baik artefak, fitur, ekofak, maupun situs. Kesemua tinggalan arkeologi itu menjadi sumber informasi untuk memahami manusia masa lalu. Artefak yang banyak ditemukan menjadi salah satu bahan untuk mengkaji masalah keberagaman atau pluralisme. artefak yang dapat digunakan untuk melacak akar pluralisme adalah arca dan prasasti yang berasal dari masa Bali kuno. Arca-arca yang menjadi gambaran sistem kepercayaan masyarakat masa lalu adalah arca yang bercorak Hindu dan Buddha. Arca-arca ini tersimpan diberbagai pura di wilayah Gianyar khususnya dan Bali umumnya. Prasasti juga merupakan sumber yang sangat penting dalam melacak keberagaman tersebut. Hal ini disebabkan karena prasasti memuat berbagai aspek kehidupan manusia termasuk agama yang berkembang. Selain memberikan gambaran agama yang dianut oleh masyarakat Bali kuno, prasasti juga menyiratkan bahwa dalam Hindu terdapat beberapa *sekte* atau *pakṣa* (Semadi Astra 2008, 22). Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat sejumlah pura yang mengindikasikan adanya temuan yang secara tegas menunjukkan kehadiran agama Hindu dan Buddha di Bali. Pura-pura itu adalah Pura Pegulingan, Pura Pengukur-ukuran, Pura

Agung Batan Bingin, Pura Mas Ketel, Pura Samuan Tiga, Pura Genuruan, Pura Goa Gajah, dan Pura Subak Kedangan (Astawa 2007; Suantra dan Muliarsa 2006; Srijaya dan Wiguna 2018; Dewantara 2019). Dari 8 situs tersebut, yang perlu dibahas secara lebih lengkap untuk memberikan gambaran pluralisme adalah Situs Pura Pegulingan dan Pura Goa Gajah. Kedua situs ini memiliki unsur bangunan yang mewakili agama Hindu dan Buddha yang berkembang pada zaman Bali kuno. Sementara situs lainnya hanya terdapat artefak yang masih disangsikan *ke-insitu*-annya.

Pura Pegulingan

Pura yang terletak di Banjar Basangambu ini terdapat beberapa artefak berupa arca Buddha dan fragmen tablet tanah liat. Yang menarik dari situs ini adalah adanya stupa Buddha di tengah-tengah bangunan suci pura (Gambar 1) (Astawa 2007, 6; Srijaya dan Wiguna 2018, 11). Tinggalan arkeologi di situs ini adalah sebuah bangunan stupa dan artefak berupa arca dan stupika tanah liat. Untuk memahami aspek ritual dari umat yang memanfaatkan stupa sebagai tempat ritual kiranya masih sulit untuk dijelaskan karena tidak adanya sumber-sumber tertulis yang dapat menjelaskan. Oleh karena itu, yang dapat dijelaskan dari temuan di situs ini mengenai keberadaan bangunan stupa di tengah tempat suci Hindu. Timbul pertanyaan, apakah bangunan stupa



Gambar 1. Bangunan stupa Buddha di tengah-tengah bangunan suci pura.

(Sumber: <https://posbali.co.id/>)

itu didirikan mendahului tempat suci puranya, atau dibangun secara bersamaan?. Hasil dari penelitian dan pemugaran yang dilakukan, memberikan petunjuk bahwa stupa itu berasal dari abad IX (Suantra dan Muliarsa 2006, 33). Sementara konsep pura sebagai bangunan suci bagi umat Hindu di Bali baru diperkenalkan sekitar abad XI (Ardika *et al.* 2013, 135).

Bila bangunan stupa dijadikan titik tolak pemahaman, maka dapat diduga bahwa pengikutnya tentu cukup banyak. Namun demikian, dalam perjalanannya, penganut agama Buddha tidak mengalami perkembangan yang pesat seperti halnya agama Hindu. Agama Hindu yang menjadi dominan selain karena masyarakat lokal yang sudah beralih kepercayaan juga disebabkan adanya upaya penaklukan Bali oleh Majapahit pada sekitar abad XIV (Ardika, *et al.* 2013, 245). Sekalipun agama Hindu pemeluknya dominan, tetapi mereka tetap menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan. Itulah sebabnya sampai sekarang bangunan stupa yang berdiri kokoh ditengah-tengah bangunan suci pura menjadi bukti keharmonisan kedua agama pada masa Bali kuno (Astawa 2007, 10; Sriyaya dan Wiguna 2018, 27). Artinya, bahwa bangunan atau artefaktual yang ada sebelum Hindu berkembang luas tidak dihancurkan melainkan menjadi bagian dalam tradisi agama Hindu di Bali khususnya dan Indonesia umumnya. Hanya saja yang perlu dicatat, bahwa bangunan stupa ini tidak lagi difungsikan sebagai bangunan suci yang sewaktu-waktu dapat dipakai untuk melakukan upacara keagamaan. Pada saat ada rombongan pengunjung yang kebetulan penganut Buddha lalu mereka melakukan prosesi ritual (gambar 2). Berbeda halnya dengan umat Hindu yang memfungsikan pura sebagai tempat persembahyangan maka pada hari *piodalan*-nya akan dilakukan serangkaian upacara keagamaan sesuai dengan *purana* pura tersebut atau *ilekite* yang berkaitan dengan pura ini (Astawa 2007, 10; Sriyaya and Wiguna 2018, 27).



Gambar 2. Umat Buddha didampingi umat Hindu melakukan prosesi mengelilingi stupa. (Sumber: <https://posbali.co.id/>)

Pura Goa Gajah

Pura ini terletak di Banjar Goa, Desa Bedulu juga menyimpan artefak dan bangunan Hindu maupun Buddha (gambar 3 dan 4). Artefak yang bercorak Hindu adalah arca Ganeśa, lingga, dan arca pancuran. Arca Ganeśa disimpan dalam sebuah ceruk di dalam gua. Arca ini digambarkan dalam sikap duduk di atas padma ganda. Kondisi arca tergolong masih baik. Arca digambarkan bertangan empat dengan atributnya adalah tangan kiri depan membawa mangkuk tengkorak, tangan kiri belakang membawa *parasu*, tangan kanan



Gambar 3. Arca Dhyani Buddha di Pura Goa Gajah. (Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2020)



Gambar 4. Trilingga di Pura Goa Gajah.
(Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2020)

depan membawa *danta*, dan tangan kanan belakang membawa *akṣamāla*. Sementara unsur-unsur badaniah seperti pakaian yang dikenakan memberikan kesan sebagai arca yang bergaya abad XIV (Wenten 1984, 84).

Kemudian, *trilingga* yang juga ditempatkan pada sebuah relung di dalam gua merupakan satu-satunya lingga berpasangan di tempat ini. Trilingga ini diletakkan berjajar di atas lapik segi empat. Ketiga lingga merupakan *pseudo lingga* yang terdiri atas bagian bulatan (*Śiwa/Rudra bhaga*) dan segi empat (*Brahma bhaga*), sementara lingga biasanya terdiri atas tiga bagian, yaitu segi empat (*Brahma bhaga*), segi delapan (*Wiṣṇu bhaga*), dan bulat (*Śiwa/Rudra bhaga*) (Saputra 1986, 100–101). Lingga merupakan simbol Dewa Śiwa sekaligus juga simbol Dewa Trimurti. Pemujaan Siwa dalam wujud lingga tertua disebutkan dalam prasasti Canggal berangka tahun 732 (Soemadio 2008, 129). Di Bali, lingga sebagai simbol Dewa Siwa yang difungsikan sebagai media pemujaan jumlahnya cukup banyak ditemukan. Karena banyaknya temuan lingga ini, sehingga Goris menafsirkan bahwa pada zaman Bali kuno pernah dianut aliran *pāśupatha* (pemuja lingga) (Goris 1974, 7).

Selanjutnya, arca pancuran (gambar 5) yang ditempatkan pada kolam *petirthaan* di depan gua. Arca pancuran di kolam ini terdapat 6 buah yang ditempatkan menempel pada dinding timur kolam. Kolam ini disekat dengan pembatas yang terbuat dari bahan batu padas



Gambar 5. Arca Pancuran di Pura Goa Gajah.
(Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2020)

di tengah-tengah. Sisi utara kolam ini terdapat 3 buah arca pancuran dan di sisi selatan 3 buah. Di tengah sejajar dengan arca pancuran ditempatkan arca Ganeśa (Suantra dan Muliarsa 2006, 44; Srijaya dan Wiguna 2018, 51). Pada beberapa bagian arca sudah aus, namun demikian unsur-unsur badaniah dan non badaniah masih dapat diamati, misalnya gelang lengan, gelang tangan, kain, mahkota, hiasan telinga dan sebagainya. Suatu hal yang menarik dari arca pancuran ini adalah pancuran atau saluran air keluar dari pusarnya. Arca sejenis ditemukan di *petirthaan* Belahan di lereng selatan Gunung Penanggungan Jawa Timur (Raka 1985, 75–77) dengan tempat keluarnya air dari kedua payudaranya. *Petirthaan* Belahan ini dibangun sebagai tempat pen-*dharma*-an raja Airlangga yang berkuasa di Jawa Timur pada abad XI. Atas kesamaan bentuk dan gayanya, maka arca pancuran Goa Gajah diperkirakan berasal dari abad XI (Raka 1985, 85).

Sementara itu, artefak yang bercorak Buddha adalah dua buah arca Dhyani Buddha (Gambar 3), arca Hariti (gambar 6), dan runtunan relief stupa dengan *catra yasti* (Astawa 2007, 5; Rema 2016, 27; Suantra dan Muliarsa 2006, 35; Srijaya dan Wiguna 2018, 31). Arca Dhyani Buddha yang ada di



Gambar 6. Arca Hariti di Pura Goa Gajah.
(Sumber: Tim Peneliti, 2020)

Pura Goa Gajah berdasarkan sikap tangan (*mudrā*) terdiri atas Dhyani Buddha Amitabha dan Dhyani Buddha Amogasidhi. Kedua arca Buddha ini ditempatkan dalam sebuah ceruk sebelah selatan gua. Dhyani Buddha Amitabha kondisinya masih bagus, terbuat dari batu andesit, digambarkan duduk dengan sikap *padmasana*, yaitu kaki kiri dan kanan ditekuk ke depan kaki kanan di atas kaki kiri dengan lapik berbentuk *padmaganda*. Rambut kriting menyerupai rumah siput di atasnya terdapat *usnisha*. Daun telinga panjang dan dibagian bawah terdapat lubang. Muka aus, hidung dan mulut aus, mata digambarkan setengah terpejam, dibagian tengah dahi terdapat *urna*. Kedua tangan diletakkan di depan perut tangan kiri berada di bawah tangan kanan dengan telapak tangan menghadap ke atas (*dhyana mudrā*). Dalam *panteon* Budhis, Dhyani Buddha ini sebagai penguasa arah barat. Kemudian Dhyani Buddha Amogasidhi kondisinya sudah tidak utuh lagi dengan kepala sudah hilang. Terbuat dari batu andesit, sikap duduk *padmasana* di atas *padmaganda*. Pada bahu kiri terlihat jubah yang sangat tipis dan panjang sehingga menyentuh pergelangan kaki. Dari patahan tangan yang tersisa dapat diduga bahwa arca tersebut adalah Dhyani Buddha Amogasidhi dengan sikap tangan *abhaya mudrā* dan menempati arah utara. Berdasarkan karakter yang diperlihatkan oleh kedua arca Dhyani Buddha yang memperlihatkan kesamaan

dengan arca Dhyani Buddha yang menghiasi Candi Borobudur maka dapat diduga bahwa kedua arca itu berasal dari abad IX.

Selanjutnya arca Hariti yang ditempatkan pada sebuah *palinggih* di depan kolam *petirthaan*. Arca ini masih dalam kondisi yang cukup baik, namun di beberapa bagian sudah agak aus. Arca digambarkan dengan payudara yang besar, memakai kain panjang hingga di atas mata kaki dengan hiasan yang raya, mulut tersenyum dengan taring kelihatan, mata terbuka, dan bentuk muka bulat. Tangan kanan digambarkan dalam sikap *waramudrā* dikelilingi oleh 6 anak, satu di antaranya berada dipangkuannya (Ambarawati dalam Rema 2016, 23). Hariti sebagai perlambang ibu pertiwi (*mother earth*) sudah dikenal pada masa Mataram Kuno abad VIII-X. Pada masa ini, perwujudan Hariti ditemukan di Candi Mendut. Dalam cerita mitologi dikatakan bahwa pada awalnya ia adalah seorang ibu yang sangat membenci pada anak-anak, kemudian setelah mendapat pencerahan dan menjadi pengikut agama Buddha berbalik sebagai penyayang anak.

Dalam tradisi masyarakat Bali, terdapat banyak tokoh pelindung anak. Namun, dari sekian kisah yang hidup di tengah masyarakat, yang paling populer adalah kisah Pan Brayut dan Men Brayut. Kedua tokoh ini disimbolkan sebagai lambang kesuburan, dan juga sebagai simbol kasih sayang kepada anak-anak (Rema 2016, 25) walaupun dengan latar belakang berbeda. Hariti dilatarbelakangi oleh karakter keraksasaan dari tokoh *yaksi* yang keras kepala ingin memakan anak-anak, adalah suatu penonjolan filosofis Budhis, akan pentingnya pencerahan batin. Menurut ajaran Buddha, setiap makhluk berhak atas pencerahan dan dinyalakan lilin rohaninya agar menyadari hakikat dirinya. Ini berarti bahwa setelah memahami hakikat dirinya, dia berharap ke depan tidak muncul sifat-sifat pembenci, pembantai anak-anak, sebaliknya diharapkan tumbuh sikap kasih sayang terhadap anak-anak. Sementara tokoh

Men Brayut yang dilatarbelakangi oleh cita-cita kekuatan seorang ibu yang mampu melahirkan dan menyelamatkan anak yang dilahirkannya (Rema 2016, 26).

Selanjutnya, runtuhannya relief stupa di Tukad Pangkung. Relief stupa ini dipahatkan pada tebing sungai yang telah runtuh. Dari runtuhannya itu, terlihat adanya pahatan berupa 13 payung atau *catra* yang merupakan bagian dari stupa. Anda berbentuk setengah bola dan di atas *anda* terdapat *meddhi* bersusun empat yang diproyeksikan keempat arah serta susunan *catra yasti* (Astawa 2007, 6). Dari sisa relief yang masih dapat diamati, kiranya keseluruhan dapat dipastikan bahwa lokasi ini selain ditempatkan arca-arca Buddha juga didirikan bangunan sebagai media pemujaan. Dari deskripsi yang dipaparkan di atas, dapat dijelaskan bahwa pada abad IX- XIV masyarakat hidup secara harmonis di antara para pemeluk kepercayaan yang berbeda.

Bukti-bukti arkeologi yang ada di Pura Pegunungan dan Pura Goa Gajah mencerminkan keharmonisan yang terjadi pada masa Bali kuno, walaupun kedua artefak itu berasal dari masa yang berbeda. Artefak Budhis seperti stupa pegunungan dan arca Dhyani Buddha di Goa Gajah lebih tua dibandingkan artefak hindu di kedua situs itu tetapi oleh pemeluk Hindu yang kemudian memanfaatkan tempat itu sebagai tempat suci tidak menghancurkan artefak-artefak yang berbeda latar belakang keagamaannya. melainkan dilindungi. mengindikasikan bagaimana kedua penganut yang berbeda dapat hidup berdampingan tanpa gesekan-gesekan yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, sekalipun belum mampu menjelaskan ritual keagamaan yang dijalankan pada saat itu, setidaknya tidaknya bahwa masyarakat yang berlainan keyakinan bisa saling menghargai satu sama lainnya. Di Pura Goa Gajah berdasarkan bukti arkeologi bahwa sejak abad IX sudah ada aktivitas keagamaan khususnya agama Buddha, kemudian ditempat yang sama pada abad XI berlangsung aktivitas

agama dari penganut Hindu sebagaimana ditunjukkan oleh artefak yang ada di dalam gua maupun di luar gua. Bahkan berdasarkan sumber Negarakertagama yang digubah oleh Mpu Prapañca dari abad XIV tempat ini disebut-sebut sebagai salah satu yang ditaklukan oleh Majapahit.

Dari penjelasan di atas, bila dikaitkan dengan konsep pluralisme budaya, maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat pada masa Bali Kuno sudah dapat saling menghargai satu sama lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik. Baik sumber tekstual maupun artefaktual belum ditemukan bukti karena perbedaan keyakinan (agama) bisa menimbulkan konflik. Konflik yang muncul dari perjalanan sejarah bangsa ini lebih diwarnai oleh kepentingan kekuasaan. Menjaga harmonisasi di tengah perbedaan menjadi sebuah cita-cita bersama agar dapat menjalankan hidup dengan damai. Walaupun terdapat perbedaan kepercayaan, bahkan menurut (Goris 1974, 3) pada masa Bali Kuno terdapat sembilan sekte namun kehadiran sekte-sekte tersebut tidak menimbulkan konflik. Bahkan, atas usaha Mpu Kuturan, kesembilan sekte kemudian lebur menjadi konsep tri tunggal, yaitu Brahma, Wiṣṇu, dan Śiwa. Konsep tri tunggal atau tri murti ini diimplentasikan ke dalam konsep *kahyangan* tiga di setiap desa adat di Bali.

Pluralisme berdasarkan Rekaman Prasasti

Selain artefak dan fitur, prasasti menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam memahami sistem kepercayaan yang dianut pada masa Bali Kuno. Prasasti adalah salah satu tinggalan yang banyak ditemukan di Bali. Isinya mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat di Bali yang berlangsung pada zaman Bali Kuno dari abad IX-XIV. Sebagai sumber sejarah untuk mengungkap peristiwa masa lalu prasasti menjadi dokumen autentik tentang masa lalu yang dikeluarkan oleh raja atau penguasa. Prasasti Bali Kuno juga memberikan gambaran mengenai kepercayaan

atau agama yang dianut oleh masyarakat yakni dengan disebutkannya pemimpin agama Śiwa dan Buddha.

Pemimpin agama Siwa dengan sebutan *Dang Accharya* dan pemimpin agama Buddha *Dang Upadhiyaya*. Dengan penyebutan pemimpin agama ini diyakini pada masa Bali Kuno sudah dianut agama Hindu (*Śiwasiddhānta*) dan agama Buddha. Prasasti tidak secara eksplisit menyebut adanya *sekte-sekte* yang berkembang pada masa Bali Kuno. Namun penyebutan nama-nama dewa dapat diinterpretasikan sebagai kehadiran *sekte/paksa*. Goris dalam bukunya *Sekte-sekte di Bali* (1974, 3), menyatakan bahwa pada masa Jawa Kuno, menurut catatan yang di buat oleh Th.G.Th. Pegeaud, di Jawa telah ada tujuh *sekte/paksa*, yaitu (1) *Śewa*, Śiwa-Siddhānta yang kemudian disebut Sridhanta, (2) *Pāśupatha*, (3) *Bhairawa*, (4) *Weṣṇawa*, (5) *Bodha atau Sogata*, (6) *Brāhmaṇa*, (7) *Sang Rṣi*. Ditambahkan pula oleh Goris bahwa dalam agama Hindu, setelah abad IX atau X, jumlah *sekte* semakin banyak dan kelompok-kelompok ulama semakin terbagi ke dalam beberapa *subsekte*.

Kondisi keagamaan di Bali pada masa Bali Kuno pun tidak jauh berbeda dengan di Jawa. Goris mencatat di Bali pada masa lampau terdapat sembilan *sekte*, yaitu (1) *Śiwa-Siddhānta*, (2) *Pāśupatha*, (3) *Bhairawa*, (4) *Wesnawa*, (5) *Boddha atau Sogata*, (6) *Brāhmaṇa*, (7) *Rṣi*, (8) *Sora* atau penyembah Sūrya, dan (9) *Gaṇapatya* atau penyembah Ganeśa (Goris 1974, 11–12). Dari Sembilan *sekte* yang disebutkan Goris, tidak semuanya tersirat dalam prasasti Bali Kuno. Hasil pelacakan prasasti Bali Kuno ditemukan hanya enam *sekte*, yaitu (1) *Śewa*, (2) *Sogata atau Boddha*, (3) *Rṣi*, (4) *Mahābrāhmaṇa* identik dengan *Brāhmaṇa*, (5) *Weṣṇawa*, dan (6) *Gaṇapatya* (Semadi Astra 2008, 26).

Sekte Saiwa (Sewa)

Sekte Śewa (brahmana) dan *Sogata* sekurang-kurangnya sudah ada sejak akhir abad X Masehi tersebar luas di Bali. Dalam prasasti 302 Serai AII (915 Śaka/ 993) disebut adanya

sejumlah wakil pendeta masing-masing *sekte* yang mendapat posisi penting dan peranan strategis dalam struktur pemerintahan. Mereka hadir dalam sidang kerajaan sebagai anggota *Samohanda Senāpati Nāyaka di Pasamakṣa Palapnan Makasupratibadhha*. Lembaga ini identik dengan Majelis Permusyawaratan Paripurna Kerajaan (Semadi Astra 2008, 27). Lembaga itu menurut Semadi Astra dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu (1) kelompok tokoh agama yang terdiri atas sejumlah pendeta Śiwa dan Buddha, dan (2) kelompok tokoh non agama, yang terdiri atas mereka yang berpangkat *Senapati* (pemimpin tentara, panglima perang), *Samgat* (ada yang dengan tambahan *ser, adhi-kāraṇa, nāyaka atau caṣu*) (Goris dalam Semadi Astra 2008, 27).

Suatu hal yang menarik dari rumusan penyebutan tokoh agama yang hadir tampaknya tidak selamanya konsisten. Dalam Prasasti Serai AII pendeta Buddha disebutkan lebih dahulu (*makadi mpungku sogata mahēśwara*). Dalam beberapa prasasti pendeta Siwa atau Maheswara lebih sering disebut mendahului pendeta Buddha. Perbedaan jumlah pendeta Siwa yang dilibatkan dalam lembaga pemerintahan, mengindikasikan penganut *sekte-sekte* itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Dalam prasasti para pendeta itu menggunakan identitas *dang ācārya* (DA) bagi pendeta Śiwa dan *dang upādhiyāya* (DU) bagi pendeta Buddha.

Kehadiran *sekte Śiwa* di Bali memang sulit untuk dipastikan. Namun demikian, dari fragmen prasasti berbahasa Sansekerta dan berhuruf Bali Kuno yang ditemukan di Pura Penataran Sasih Pejeng menjadi bukti yang sangat berharga. Fragmen itu terbaca “...*manuśasana*... (pada fragmen d),”.... *mantramārgga*.. (pada fragmen g),”... *Śiwas (...)...ddh*.. (pada fragmen h) yang kemungkinan besar selengkapnya berbunyi... *śiwasiddhanta*, dan ...*sakālabhwanakṛti*... (pada fragmen k) yakni nama lain untuk *Wiśwakarma* (Stutterheim dalam Semadi Astra 2008, 28). Menurut Stutterheim, isi prasasti itu bersifat keagamaan. Kata *Sakalabhuwanakṛti*

lazimnya cenderung diidentikkan dengan *Prajāpati* (Brahma) sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, tetapi ada juga yang menghubungkan sebagai arsitek dikalangan para dewa dan diidentikkan dengan putra Dewa Brahma (Semadi Astra 2008, 28). Fragmen prasasti itu tidak disertai angka tahun namun berdasarkan komparasi bentuk hurupnya dengan prasasti di Jawa Tengah lalu Stutterheim menyimpulkan diantara fragmen-fragmen itu ada hurufnya yang berasal dari tahun 800 Saka (878) atau awal abad IX (Stutterheim 1929, 59).

Walaupun prasasti Bali Kuno tidak memberikan ciri-ciri *sekte* Śiwa atau Śiwa Sidhānta, tetapi Goris menyatakan *sekte* inilah yang paling mewarnai agama Hindu di Bali. *Sekte* ini memiliki lima ciri, yaitu (1) *arcane* (upacara agama), (2) *mudrā* (sikap tangan), (3) *mantra* (mantra), (4) *kupamantra* (mantra utama, yaitu pujian kepada Siwa sebagai Dewa Matahari), dan (5) *praṇawa* (suku kata suci Om dan Ongkara) (Goris 1974, 13–14). Berdasarkan penelusuran terhadap prasasti-prasasti Bali Kuno, Semadi Astra (2008, 26) menyatakan bahwa *namaśiwāya namabuddhaya* yang berarti hormat kepada Siwa, hormat kepada Buddha sebagaimana terbaca pada Prasasti Landih A=Nongan A menjadi petunjuk perkembangan Siwa dan Buddha di Bali. Bagian ini menunjukkan bahwa raja bakti kepada Dewa Siwa dan Buddha dan sudah tentu juga memperhatikan kedua agama tersebut.

Sekte Sogata (Buddha)

Tidak disebutkan secara eksplisit keberadaan *sekte* ini dalam prasasti Bali Kuno, tetapi dalam prakteknya selalu disebut berpasangan dengan *sekte* Śiwa (Maheśwara) dalam kedudukannya sebagai anggota pejabat pemerintahan. Dalam prasasti-prasasti seperti prasasti 302 Serai AII (915 Śaka), prasasti 303 Buwahan A (916 Śaka), dan prasasti 303 Sading A (923 Śaka) pasangan ini disebutkan dengan formula *sogata maheśwara* atau *sogata mahaiswara* (Semadi Astra 2008, 29) Sementara dalam prasasti-prasasti sesudahnya

disebut dengan formula sebaliknya yaitu *sewasogata*, atau dengan varian-varian kecil tanpa mengurangi maknanya seperti tersurat dalam prasasti Landih A=Nongan A. Keadaan agama Buddha di Bali sedikit banyak dapat ditelusuri dari adanya mantra-mantra Buddha yang banyak di temukan di Bali (Pejeng, Pegulingan, Kalibukbuk-Singaraja). Walaupun tidak ada angka tahunnya, tetapi keberadaannya dapat ditelusuri hingga abad VIII. Mantra-mantra Buddha yang sering disebut *ye-te-mantra* ini ditulis pada tablet tanah liat yang disimpan dalam stupika tanah liat. Pembicaraan tentang sekte Bodha atau Sogata oleh (Goris 1974, 16) dikatakan memiliki karakter sebagai berikut:

- A) Buku sastra agama *sekte* ini selain tulisan-tulisan tentang agama yang umum adalah *Kamahāyānikan* yang di Bali lazim disebut *Jina (Jnāputra)*;
- B) Mantra-mantra pendeta Buddha yang juga digunakan oleh pendeta Śiwa-adalah *Saptoganggā, Wyañjana*, dan *Sūryastawa*. Selain itu, mereka juga mengenal mantra *Triganggā, Pañcaganggā*, dan *Nawaganggā*;
- C) Pendeta Buddha menggunakan mantra *Barunastawa, Saraswatistawa*, dan *Pr̥thiwistawa* yang sesungguhnya tergolong mantra-mantra Hindu, tetapi justru tidak digunakan oleh pendeta Śiwa pada upacara-upacara biasa. Mantra Wiṣṇu yang masih digunakan dalam upacara Budhis di Bali adalah *Pañcanarasingha*;
- D) Mantra-mantra yang khas Budhis adalah *Pradjñaparāmitā dan Bajramaṇḍala*.

Sekte Ṛṣi (Rēṣi)

Kata *ṛṣi* pertama kali ditemukan dalam prasasti nomor 555 Depaa (-Śaka) yang dikeluarkan oleh Raja Jayasakti (1133 Śaka-1150 Śaka). Kata *Rsi* terbaca dalam frase *mpungku sewasogatarēsi* (pendeta Śiwa, Buddha, dan Rēṣi) yang berkedudukan sebagai anggota lembaga pemerintahan. Sesudah

prasasti nomor 555, ada sejumlah prasasti juga memuat kata *rēṣi*, bahkan ditambah lagi kata *mahābrahmana* sehingga susunannya menjadi *mpungku sewasogata rēṣi mahābrahmana*. Rumusan seperti ini dimuat pada prasasti nomor 602 Bwahan E (1103 Śaka/ 1181), 603 Penida Kaja (1103 Śaka/ 1181), 605 Batur, Pura Abang B (1103 Śaka/ 1181), ketiganya berasal dari masa pemerintahan Raja Jayapangus (1177 Śaka/ 1255, 1181 Śaka/ 1259), dan prasasti 804 Cempaga C (1246 Śaka/ 1324) yang dikeluarkan oleh Raja Sri Mahaguru (1246 Śaka/ 1324, 1247 Śaka/ 1325). Cara penyebutan dengan susunan agak berbeda ditemukan dalam prasasti nomor 631 Cempaga A (1103 Śaka/ 1181) dan 802 Sukawana D (1222 Śaka/ 1300). Dalam prasasti Cempaga A terbaca para *bhūjangga ring kasewan kaswagatanrēṣi mahābrahmana* sementara dalam Prasasti Sukawana D yang berasal dari masa pemerintahan raja Patih Kebo Parud terbaca *brāhmaṇa rēṣi sewasogata* (Callenfels dalam Semadi Astra 2008, 32).

Sekte Brahmana

Istilah *mahābrahmana* “brahmana agung” yang terdapat dalam formula prasasti seperti tersebut di atas, tampaknya dapat diidentikkan dengan *sekte* Brahmana yang dikemukakan oleh (Goris 1974, 17). Informasi tentang adanya empat kasta pada masa Bali Kuno adalah data lain mengenai keberadaan *sekte* Brāhmaṇa pada masa itu. Terkait dengan keempat kasta prasasti 404 A Dawan (975 Śaka/ 1058) disebutkan bahwa siapa pun yang melanggar isi prasasti yang dimiliki oleh suatu desa, baik mereka itu tergolong *brāhmaṇa*, *kesatria*, *wesya*, dan *sudra* tidak akan luput dari sanksi, baik sanksi *sekāla* (yang berasal dari alam nyata) maupun sanksi *niskāla* (yang berasal dari para dewa, leluhur atau yang lainnya).

Bukti lain keberadaan *sekte* Brāhmaṇa pada masa Bali Kuno adalah digunakannya Kitab *Smṛti* sebagai sumber hukum pelaksanaan pemerintahan. Bukti ini terbaca pada Prasasti Cempaga A (1103 Śaka/ 1181) yang berbunyi sebagai berikut.

“...*tirunēn dening wkawet putu buyutbuyutnya kauring, bhuktinēn gawenya ring sakāla, niskāla, phalaning (tu) tur Smṛti, kaparnnah I sira, bhaṭāra ganapati ring tumpuhyang kapundyuk dyun I sira bhaṭāra...*” (Callenfels, 1926 dalam Semadi Astra, 2008: 33).

Artinya:

“...agar ditiru oleh anak cucu serta buyut-buyutnya pada masa-masa selanjutnya, dalam menikmati hasil karyanya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, (yang pada hakekatnya merupakan) pahala dari ajaran *Smṛti* yang dalam kaitan dengan Bhaṭāra Ganapati yang di puja di Tumpuhyang, (Desa Cempaga itu) berfungsi sebagai penanggung jawab utama...”.

Sekte Waiṣṇawa

Kata *waiṣṇawa* dalam prasasti Bali secara eksplisit ditemukan dalam Prasasti Gobleg Pura Batur A (-Śaka) dengan ungkapan berikut “...*anak banua di tamblingan makahajumpung, jumping waiṣṇawa...*” yang artinya “...penduduk Desa Tamblingan sebagai sebuah Jumpung (kesatuan) yakni kelompok (*sekte*) *Waiṣṇawa*...” (Goris dalam Semadi Astra 2008, 34). Kata *jumping* belum diketahui secara pasti artinya. Istilah *bhūjangga* dalam prasasti nomor 631 Cempaga (1103 Śaka/ 1181) disebutkan sebagai berikut “...*para bhūjangga ring kasewankaswagatan, rēṣi, mahābrāhmaṇa...*” (Callenfels dalam Semadi Astra 2008, 34). Melihat konteksnya, kata *bhūjangga* kemungkinan dimaksudkan adalah “pendeta”. Akan tetapi sekarang ini, predikat *bhūjangga* sering kali dikaitkan dengan kata *rṣi* sehingga terbentuk istilah *rṣi bhūjangga* yang diberikan makna pendeta kalangan *wangsa sengguhu* yang masih memiliki ciri-ciri *waiṣṇawa*.

Sekte Gaṇapatya

Nama *Gaṇapati* muncul dalam beberapa prasasti Bali Kuno, yaitu prasasti nomor 555 Depaa (-Śaka), 631 Cempaga A (1103 Śaka/1181), dan 1006 Cempaga B (-Śaka). Dalam prasasti 631 terbaca susunan yang berbunyi “...*padṛwyahyajyan karaman I campaga... kapañjing mare I sira bhaṭāra gaṇapati ring tumpuhyang...*” (Callenfels dalam Semadi Astra 2008, 35) yang artinya: “... sejumlah pungutan (iuran, pajak, dan sebagainya) yang harus dibayar oleh penduduk Cempaga... dihaturkan kepada *Bhatara Gaṇapati* (yang dipuja) di Tumpuhyang...”. Nama Tumpuhyang sebagai tempat pemujaan *Bhaṭāra Gaṇapati* (*Bināyaka*) disebutkan pula dalam Prasasti Cempaga B (Rema 2014, 158). Sementara dalam Prasasti Depaa dewa *Gaṇapati* dinyatakan dengan *Bhaṭāra Hyang Bināyaka*. Sebagai *sekte* tersendiri di Bali, keberadaannya sudah tidak dikenal lagi, namun tinggalan yang berupa arca Gaṇesa banyak ditemukan di daerah ini. Berdasarkan data-data artefak dan prasasti bahwa aliran kepercayaan yang banyak mendapat penganutnya pada zaman Bali Kuno adalah *sekte Śiwasidhanta*. Paham *Śiwasidhanta* mendapat pengakuan yang luas dikalangan masyarakat zaman itu. Namun demikian, agama Buddha juga diberikan kedudukan yang setara dalam struktur pemerintahan kendatipun penganutnya tidak sebanyak agama *Siwasidhanta*. Kebersamaan *Siwa-Buddha* semakin erat sebagaimana tersurat dalam kakawin-kakawin dari masa Majapahit seperti *Kakawin Sutasoma*, *Arjunawijaya*, dan *Nagarakrtagama*.

Siwa dan *Buddha* di Bali sangatlah erat, dan bahkan memiliki tujuan yang sama, yaitu kebebasan, namun diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda; perbedaan itu ialah kalau *Siwa* menyebutnya dengan *moksa* dan kalau *Buddha* menyebutnya dengan *nirvana* (*nirbana*), kebebasan yang dimaksud adalah menyatu dengan pencipta-Nya. Dalam *Kakawin Sutasoma*, Mpu Tantular mengungkapkan dalam

syairnya dengan ungkapan *bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa* (berbeda sebutan namun sejatinya hal itu tetap satu tidak ada Tuhan yang dua) (Mantra 2002, 25). Melalui karyanya ini, Mpu Tantular mengungkapkan tentang kemanunggalan *Siwa* dan *Buddha*, disebut *Siwa-Buddha*. Ia menyatakan bahwa Tuhan itu dua, disebut *Siwa* dan *Buddha*, konon secara umum oleh halayak disebut berbeda namun kapan dapat dibagi atau dipisahkan menjadi dua, demikian menurutnya bahwa *Jina* (kebenaran tertinggi dalam *Buddha*) dan *Siwa* (kesucian, dan kemurnian) itu adalah satu, meskipun berbeda sebutan-Nya Ia tetap satu. Pertanyaan kuat yang dinyatakan oleh Mpu Tantular adalah *ringapan kena parwanosen* (kapan dapat dibagi dua), ini adalah sebuah kenyataan bahwa antara *Siwa* dan *Buddha* adalah sebuah satu kesatuan, yang tidak dapat dipisahkan.

Ditegaskan lagi bahwa kebenaran itu satu, meskipun berbeda sebutan, yaitu disebut *Siwa* dan *Buddha*, namun sejatinya Ia tidak dapat dipisahkan, Ia sejatinya adalah satu. Dalam lontar *Agama Siwa-Buddha* dikemukakan oleh (Sugriwa 2002, 13), bahwa:

(“*apan tiwas juga sirang muni buddha paksa. yan tan wruhing parama tattwa śiwatwa margā. mangkang munindra sangapaksa śiwatatwa yoga. yan tan wruhing parama tattwa jinatwa manda*”).

Artinya:

sebagai pendeta *Buddha* dipandang kurang sempurna, jika ia tidak tahu inti sari ajaran *Śiwa*. Demikian pula sebaliknya pendeta *Śiwa* dipandang kurang sempurna jika tidak tahu inti sari ajaran *Buddha*.

Dalam salinan lontar yang berjudul *Agama Siwa-Buddha* (lembar 1b), dijelaskan bahwa:

(yeki ngaran gama siwa buddha, marmaning maharan siwa buddha, dening ida maraga siang latri, malingga roro, nga., siwa dharma, pangartiang siwa dharma manggeh utama...).

Artinya:

alasanya disebut Śiwa - Buddha karena Ia berwujud siang-malam, keduanya eksis, disebut Śiwa-Dharma, pengertian Śiwa-Dharma inilah yang utama.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa Śiwa dan Buddha itu merupakan satu rangkaian siklus alam, yang terdiri dari siang dan malam, di mana karena siang dan malam inilah maka lengkap disebut satu hari. Jika belum lengkap keduanya datang maka belumlah disebut satu hari. Demikian juga kiranya yang disebut Śiwa-Buddha itu, sebagaimana yang diuraikan oleh Sugriwa, bahwa Śiwa tanpa Buddha belum sempurna, demikian pula Buddha tanpa Śiwa juga belum sempurna. Maka ini memberikan arti bahwa untuk menjadi Buddha yang sempurna haruslah mempelajari hakikat Siwa, dan untuk menjadi Siwa yang sempurna harus juga mempelajari hakikat Buddha. Dinyatakan tidak sempurna jika Siwa tanpa memahami hakikat Buddha, demikian pula Buddha tidak sempurna tanpa memahami hakikat Siwa, ini karena ajaran Siwa-Buddha adalah ajaran lahir dan batin.

Ajaran Buddha penekanannya pada penyerahan diri sepenuhnya kepada alam, tanpa terikat sedikitpun akan hal-hal duniawi, termasuk dirinya sendiri. Ajaran Siwa juga sama, yaitu menekankan juga penyerahan diri, tetapi perbedaannya adalah diperbolehkan melakukan pembelaan diri dengan lima macam syarat (*pañca nr̥ta*); bohong kepada musuh, bohong kepada perampok, kepada pembunuh, kepada anak-anak dan ketika bersenda-gurau atau bercumbu-cumbuan, boleh membunuh binatang untuk dimakan, membunuh musuh

dalam perang tanding. Menurut Sugriwa karena kedua ajaran ini masing-masing memiliki peran dalam mensejahterakan manusia maka kedua ajaran ini dapat dipersatukan. Buddha mensejahterakan batin, Siwa juga sama tetapi diizinkan untuk melakukan kecurangan dengan alasan kebaikan. Karena manusia hidup perlu mencapai kesejahteraan lahir dan batin maka cocoklah kedua ajaran ini dianut.

Selain merupakan pencerminan siklus siang malam, Ia juga dipandang sebagai penyebab lahir, hidup, dan matinya makhluk hidup. Pandangan ini tersurat dalam Kakawin *Kandhawa– Dahana* (Sugriwa 2002, 40) sebagai kutipan berikut.

“Ndatan len kita Buddha rupa Śiwa rupa pti huripikang tri manadala. Sang sangkanparaning sarat ganalalit kita hala hayukojaring haji. Utpatti sthiti linaning dadi kitakaranani paramartha sogata.”

Artinya:

Tidak lain engkau merupakan Buddha merupakan Śiwa yang menjadi jiwa tiga buwana. Engkau yang menjadi asal dan tujuan kembalinya dunia, berbadan besar atau kecil, mengatur baik atau buruk, menurut ajaran agama. Lahir, hidup, dan matinya sekalian makhluk, engkaulah yang menyebabkannya, engkau disebut Siwa atau Buddha.

Berkaitan dengan pemujaan Siwa dan Buddha pada bangunan suci Padmasana kita dapatkan ungkapannya dalam Kakawin Arjuna Wijaya yang digubah oleh Mpu Kanwa pada masa pemerintahan raja Airlangga dan Kakawin Sutasoma yang di gubah Mpu Tantular pada masa pemerintahan prabu Hayam Wuruk. Dalam Kakawin Arjuna Wijaya disebutkan seperti kutipan berikut.

*“sanyambek nirang jambakena
hilang ikang jong tan pajamuga;
sumyuk tang puspa warsamarengi
jaya-jayastungkara maya-maya
jaganjali wekasan anon teja kara-
kara; saksat drestarddhanariswara
teka hana ring padmasana mani”*.

Artinya:

Dengan penuh keyakinan Sang Arjuna hendak membanting kedua kaki Hyang Siwa; namun tiba-tiba beliau lenyap tanpa bekas. Hujan bunga bertaburan, terdengar puja mantra kejayaan mengiringinya. Sungguh amat menakjubkan sehingga akhirnya Sang Arjuna bersujud ketika melihat cahaya gemerlapan. Hyang Siwa beserta saktinya (Ardhanariswari) seketika menampakkan diri dan duduk di atas padmasana permata (Agastya 2002, 162).

Sementara, Mpu Tantular dalam karyanya Kakawin Sutasoma menyebutkan pula bahwa Hyang Buddha juga berstana pada bangunan suci padmasana seperti kutipan berikut.

*”Çri Wairocana dibyarup
pakarupanira ri pupating
kacantikan; mwang padmasana
ratna pangkaja palinggihan nira
saha Buddha laksana; lilabhusana
sarwa ratna dumilah makutamani
suteja bhaswara; aksobhyadi
huwus mamuja ri sira jaya-jaya
paramadi dewata”*.

Artinya:

Śri Wairocana dengan penuh pancaran cahaya karena telah mencapai kedamaian; Beliau duduk di atas padmasana, bunga tunjung permata disertai dengan

sikap sebagai Buddha; dengan busana permata yang bercahaya serta hiasan kepala bercahaya cemerlang; Beliau adalah dewata utama yang menguncarkan puja kejayaan (Agastya 2002, 163).

Untuk lebih menjelaskan uraian di atas, dalam naskah Agama Śiwa-Buddha, disebutkan bahwa Bhatara Gurulah sesungguhnya yang menjadi Hyang Buddha (hal. 1b-2a) dijelaskan:

*“kaulatang ring aji tantu
paggelaran, nyaritayang jagat
punika saduke kari kambang,
saking pakayunan ida bhatara
guru, risampun mangkana, bhatara
guru madeg hyang buddha”*.

Artinya:

Hyang Buddha di sini adalah manifestasi dari Bhatara Guru. Kepercayaan Śiwa-Buddha di Bali, mengemukakan representasi kebenaran tertinggi dalam bentuk sosok ketokohan, yaitu Bhatara Guru.

Dari uraian berbagai sumber di atas, kiranya dapat dipahami bahwa pada masa Bali Kuno keberadaan dua agama beserta *sekte/paksa* yang ada di dalamnya bukan sebuah hambatan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Agama Buddha yang dianut oleh masyarakat dapat diterima secara damai oleh penganut Hindu (Siwasidhanta) yang menjadi pemeluk mayoritas karena agama Buddha dapat menghormati dan menghargai agama mayoritas sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Hal ini sejalan dengan konsep pluralisme budaya yang dikemukakan oleh Horace Kallen sejalan dengan pandangan Ahwot sebagaimana dijelaskan di atas. Fakta-fakta arkelogi dilapangan yang memperlihatkan banyaknya temuan arca Ganesa tidak dengan

sertamerta menjadi *sekte* yang dominan, melainkan Śiwasidhāntalah yang mendapat pengakuan luas dikalangan masyarakat seperti di kemukakan oleh Soebadio (1971) dalam bukunya *Jñanasidhānta*.

KESIMPULAN

Pluralisme merupakan sebuah paham yang terdiri atas berbagai suku, agama, asal, dan latar belakang budaya. Dalam hal ini yang penting adalah adanya keragaman atau kemajemukan tanpa melihat interaksi di antara mereka. Budaya yang dominan harus mengakomodir kelompok masyarakat minoritas tanpa melebur budaya aslinya.

Pada masa Bali Kuno, telah hidup harmonis berdampingan dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Kedua agama ini dapat hidup rukun di tengah perbedaan karena antara penganut agama memiliki konsep yang sama, yaitu *Bhineka Tungga Ika* yang kemudian menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pluralisme budaya sebagaimana digambarkan di atas, merupakan cerminan dan gambaran tentang jatidiri bangsa Indonesia yang menghargai perbedaan; Perbedaan ini justru menjadi pemersatu masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, suku, maupun budaya. Data tektual seperti prasasti, karya sastra serta artefaktual yang ditemukan di Jawa dan Sumatra dari abad V memberikan gambaran masyarakat plural dan multikultural.

Perbedaan ini tidak hanya tampak dari adanya dua agama Hindu dan Buddha, melainkan di dalam agama Hindu juga tersirat adanya aliran/*sekte* sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan bukti-abukti arkeologis terdapat 9 *sekte* yang pernah berkembang pada masa Bali kuno, namun belakangan sebagian dari 9 *sekte* itu sudah punah atau tidak ada lagi pengikutnya. Demikian pula dalam agama Buddha terdapat *sekte-sekte*, akan tetapi yang banyak mendapat pengikut adalah Buddha Mahayana.

Selain artefak arkeologi, prasasti dan karya sastra memberi gambaran kepada kita bagaimana dimasa lalu masyarakat telah dapat membangun kerbersamaan ditengah perbedaan. Hal ini tersirat dari Kakawin Sutasoma, Nagarakertagama, Arjunawiwaha, lontar agama Siwa-Buddha dan lontar Kandhawa-Dahana.

SARAN

Indonesia sejak awal sudah dihuni oleh berbagai ras manusia dengan peradabannya yang berbeda-beda. Perbedaan suku, agama, budaya dan adat istiadat yang mencerminkan keragaman budaya Nusantara adalah sebuah karunia yang sangat berharga. Karunia yang berupa keragaman budaya bila tidak disikapi dengan bijaksana oleh setiap warganya niscaya dapat menimbulkan konflik horizontal. Oleh karena itu, memahami nilai-nilai budaya yang berbeda satu dengan lainnya setidaknya-tidaknya dapat menghindari terjadinya konflik. Demikian pula dengan kondisi pada masyarakat Bali kuno, yang hidup berbagai sekte dapat dipersatukan menjadi konsep Tri Murti yang dicetuskan oleh Mpu Kuturan.

Pembicaraan tentang pluralisme tidak akan pernah habis, karena masalah pluralisme merupakan sebuah realita yang ada di muka bumi termasuk di Indonesia. Indonesia yang dikaruniai berbagai kelebihan termasuk suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang satu dengan lainnya berbeda menjadi sebuah keharusan untuk merawat perbedaan itu. Dengan merawat perbedaan ditengah isu-isu konflik social niscaya akan menjadi inspirasi bagi dunia. Oleh karena itu, merawat perbedaan ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata melainkan adalah menjadi kewajiban kita Bersama sehingga hidup harmoni ditengah perbedaan bisa terwujud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Udayana atas dukungan finansialnya sehingga penelitian

ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang telah memberikan fasilitas selama penelitian berlangsung. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada masyarakat yang ada di sekitar DAS Pakerisan dan Petanu yang telah memberikan keleluasaan bagi tim untuk melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastya, Ida Bagus Gde. 2002. "Padmasana Dan Siwa—Buddha Puja." dalam *Siwa-Buddha Puja Di Indonesia*, 162-163. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Ardika, I Wayan, I Gde Parimartha, and Anak Agung Bagus Wirawan. (Editor) 2013. *Sejarah Bali Dari Prasejarah Hingga Masa Modern*. Denpasar: Udayana Press.
- Astawa, Anak Agung Gede. 2007. "Bukti-Bukti Awal Agama Buddha Di Gianyar Dan Buleleng, Bali Abad IX-XII M." *Majalah Sudamala* 11 (01): 05-10.
- Bagus, Anak Agung Gde, and I Nyoman Rema. 2017. "Keharmonisan Dalam Tinggalan Arkeologi Di Pura Dangka Tembau Denpasar." *Forum Arkeologi* 30 (02): 65-76.
- Dewantara, Anak Agung Gede Raka. 2019. "Arca Hindu-Buddha Di Pura Agung Batan Bingin Pejeng Kawan Tampaksiring, Gianyar: Kajian Ikonografi Dan Fungsi." Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
- Goris, R. 1974. *Sekte-Sekte Di Bali*. Jakarta: Bhratara.
- Kawuryan, Sekar Purbarini. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mantra, Ida Bagus. 2002. "Pengertian Siwa-Buddha Dalam Sejarah Indonesia." dalam *Siwa-Buddha Puja di Indonesia*, 25. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Raka, Anak Agung Gede. 1985. "Arca Pancuran Di Desa Pejeng Dan Bedulu". Skripsi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Rema, I Nyoman. 2014. "Arca Ganesa Dalam Sikap Swastikasana." *Forum Arkeologi* 17 (2): 155-168.
- _____. 2016. "Transformasi Ideologi Hariti Di Bali." *Forum Arkeologi* 26 (2): 109-124.
- Santiko, Hariani. 2013. "Toleransi Beragama Dan Karakter Bangsa: Perspektif Arkeologi." Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 6-8.
- Saputra, I Made Linggar. 1986. "Lingga Pada Beberapa Pura Di Desa Pejeng Dan Bedulu (Kajian Konsepsi)". Skripsi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Semadi Astra, I Gde. 2008. "Sekte-Sekte Pada Masa Bali Kuno Berdasarkan Rekaman Prasasti." dalam *Dinamika Masyarakat Bali dalam Lintasan Sejarah*, 22-35. Denpasar: Swasta Nulus.
- Soebadio, Haryati. 1971. *Jnanasiddhanta*. Jakarta: Djambatan.
- Soemadio, Bambang. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Srijaya, I Wayan, dan I Gusti Ngurah Tara Wiguna. 2018. Pemanfaatan Warisan Budaya Dunia DAS Pakerisan Dan Petanu Sebagai Obyek Wisata Di Kabupaten Gianyar. Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
- Stutterheim, W. F. 1929. *Oudheden Van Bali*. Singaradja.
- Suantra, Made, and I Wayan Muliarsa. 2006. *Pura Pegunungan, Tirtha Empul, Dan Goa Gajah*. Gianyar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.
- Suarbhawa, I Gusti Made. 2010. Potensi Sumberdaya Arkeologi Di DAS Kecamatan Kintamani, Bangli. Laporan Penelitian Arkeologi, Balai Arkeologi Bali, Denpasar.
- Sugriwa, I Gusti Bagus. 2002. "Siwa-Buddha Bhineka Tunggal Ika." dalam *Siwa-Buddha Puja di Indonesia*, 13-40. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Sumerata, I Wayan, dan Dewa Gede Yadhu Basudewa. 2016. "Arca Bercorak Siwaisme Di Kota Denpasar, Bali". *Forum Arkeologi* 9 (2): 93-104.

- Tanudirjo, Daud Aris. 2011. "Membangun Pemahaman Multikulturalisme: Perspektif Arkeologi" dipresentasikan pada seminar Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, Solo.
- Wenten, I Nyoman. 1984. "Ragam Hias Beberapa Arca Ganesa Di Desa Pejeng Dan Bedulu". Skripsi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Wira Darma, I Kadek Sudana. 2018. "Pengarcaan Dewa Wisnu Pada Masa Hindu-Buddha Di Bali (Kajian Ikonografi)". Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
- Wirjosoeparto, Soetjipto. 1966. "Dua Buah Arca Wisnu dari Cibuaya". dalam *Majalah Ilmu Sastra Indonesia*, 45. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Lontar Agama Siwa-Buddha (salinan koleksi Gedong Kirtya Singaraja).
- Website:
<https://posbali.co.id/empat-situs-di-gianyar-ditetapkan-sebagai-cagar-budaya/> diakses tanggal 1 Juli 2021